
PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE, KEBERADAAN DEWAN DIREKSI PEREMPUAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Meiana Maulida Hikmawati

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
Jln. Ahmad Yani Jln Ringroad Timur No.405 Bantul

e-mail: meiana@stipram.ac.id

ABSTRAK

Corporate governance mempunyai peran penting dalam menentukan nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris independen, Dewan Direksi Perempuan, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 dengan mempertimbangkan variabel kontrol. Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana penerapan mekanisme *corporate governance* menjadi sumber penciptaan nilai bagi perusahaan. Terdapat 510 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sebanyak 128 perusahaan terpilih sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa laporan tahunan perusahaan tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dewan komisaris independen, Dewan Direksi Perempuan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci: *Corporate Governance*, Perempuan, Dewan Direksi, Struktur kepemilikan, *Tobin's Q*

ABSTRACT

Corporate governance has important role to drive firm values creation. The aim of this study is to analyze the influence of corporate governance consisting of independent commissioner, women on board, audit committee, managerial ownership and institutional ownership on value of the firms listed in BEI in 2016-2020 with the adding of control variables. This study will provide an illustration on how corporate governance practices become a value creation source for the firms. There are a total of 510 companies listed in BEI. Using a purposive sampling method, 128 companies were selected as samples. The 2016-2020 annual reports of the companies are used as secondary data source of this research. This study using multiple linear regression analysis. The results indicate that only independent commissioner, women on board and institutional ownership had positive and significant affects firm's value.

Keywords: *corporate governance*, women, board of directors, ownership structure, *tobin's q*

1. PENDAHULUAN

Kasus Enron dan WorldCom mengarahkan perhatian dunia pada kebutuhan akan penerapan mekanisme *Corporate Governance*. Kedua perusahaan ini jatuh dan kehilangan kepercayaan publik dan investornya pada tahun 2002 karena telah melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangannya. Berbagai pihak menyatakan bahwa dewan direksi dan komite audit tidak memiliki pengawasan yang baik terhadap manajemen (Muryati dan Suardhika, 2014). Keruntuhan kedua perusahaan tersebut disebabkan oleh kegagalan strategi dan praktik curang manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama. Selain itu, sistem regulasi yang kurang baik, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta manajer yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas juga menjadi penyebab gagalnya perusahaan-perusahaan besar tersebut. Dengan adanya dua kasus besar ini, Amerika membuat *Sarbanes-Oxley of Act* (2002), yaitu undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat yang di dalamnya memuat peraturan-peraturan baru untuk memperkuat tata kelola dan struktur akuntabilitas perusahaan publik (Djaddang et al., 2014).

Di Indonesia, *Corporate Governance* menjadi perhatian sejak terjadinya krisis tahun 1997-1999, salah satu penyebab krisis adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap direksi perusahaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab dewan komisaris (Effendi, 2008). Adanya krisis ekonomi dan moneter saat itu berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan di Indonesia. Krisis tersebut terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan *corporate governance* secara konsisten, khususnya pada saat itu belum diterapkannya etika bisnis. Sehingga, pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance GCG yang kini telah disempurnakan tahun 2006. Minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta kurangnya insentif untuk mendorong terciptanya efisiensi di berbagai perusahaan melalui mekanisme persaingan yang *fair* menyebabkan krisis tersebut menjadi semakin parah (Dwiridotjahjono, 2009).

Munculnya *Corporate Governance* juga disebabkan oleh pemisahan antara pengawasan kepemilikan perusahaan. *Corporate governance* berkaitan dengan hubungan antara manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Struktur kepemilikan saham yang terkait juga sangat penting diperhatikan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan (Abukosim et al., 2014). Kemungkinan perusahaan berada dalam posisi kesulitan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan menjelaskan komitmen pemilik dalam menyelamatkan perusahaan. Pemilik perusahaan atau para pemegang saham dapat menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga ahli atau profesional yang disebut manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, dalam usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara agen (manajer) dan prinsipal (pemegang saham) yang disebut dengan konflik keagenan, yang pada akhirnya akan memunculkan *agency cost*. Biaya ini merupakan jumlah dari biaya yang dikeluarkan pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen (Jensen dan Meckling, 1976).

Penerapan *Corporate Governance* dipandang sebagai kriteria kualitatif tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Secara teoritis, apabila diterapkan dengan baik dan benar di perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh manajer dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan investor (Newel dan Wilson, 2002). McKinsey dan Company (2002) dalam penelitiannya membuktikan bahwa lebih dari 70% investor institusional bersedia membayar lebih (26-30% lebih mahal) saham perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang penerapannya meragukan. Perusahaan dengan penerapan *Corporate Governance* yang buruk akan kehilangan kepercayaan investor dan publik, karena pada perusahaan tersebut tidak terdapat jaminan atas keamanan investasi yang mereka tanamkan, serta kemungkinan kepentingan pemegang saham yang tidak diperhatikan menjadi pertimbangan penting bagi pemegang saham dan calon investor untuk menghindari perusahaan tersebut. Dengan hilangnya kepercayaan publik, maka kesempatan perusahaan untuk dapat berkembang menjadi semakin sulit. Dengan kata lain, nilai perusahaan tidak hanya diukur dari faktor keuangannya saja, tetapi juga kualitas *corporate governance* perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* yang terdiri dari Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi Perempuan, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, namun demikian terdapat beberapa perbedaan mendasar. Pertama, terdapat perbedaan sistem yang berlaku pada negara maju dan negara berkembang, sehingga Dualitas CEO tidak dimasukkan menjadi variabel dalam penelitian ini. Kedua, penelitian ini menambah variabel yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu Dewan Direksi Perempuan. Kumar (2016) telah membuktikan bahwa peningkatan jumlah dewan wanita bisa mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Ketiga, dalam penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan (Khan et al., 2016) dan leverage (Imani et al., 2016) sebagai variabel kontrol. Keempat, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 dengan menganalisis laporan tahunan yang telah di audit dan dipublikasikan dalam *website* www.idx.com.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih pemilik perusahaan (*principal*) menyewa orang lain yaitu manajer (*agent*) dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan yang terkait dengan kepentingan pemegang saham. Teori keagenan menjelaskan bagaimana perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, karena sebenarnya antara pemilik dan manajemen perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda yang pada akhirnya akan memunculkan terjadinya konflik keagenan. Konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. (Jensen dan Meckling, 1976).

2.2 *Corporate Governance*

Menurut *The Organization for Economic and Development (OECD)*, *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota para pemegang saham dan non-pemegang saham dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan (Sutojo dan Aldridge, 2005).

2.3 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan yang tinggi adalah tujuan jangka panjang yang harus diraih perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemegang sahamnya. Sukamulja (2004) menyatakan bahwa Tobin's Q dinilai bisa memberikan informasi nilai perusahaan yang paling baik, karena dalam rasio ini memasukkan semua unsur hutang, modal saham dan seluruh aset perusahaan. Klapper dan Love (2002) menyatakan bahwa nilai Tobin's Q merupakan rasio dari harga penutupan saham di akhir tahun buku dikali dengan banyaknya saham yang beredar ditambah nilai buku hutang dibagi dengan total aktiva.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2020. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah (1) perusahaan yang mempublikasikan *annual report* secara lengkap dan telah diaudit dan (2) perusahaan yang mempunyai data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, diperoleh sampel sebanyak 128 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 20. Berikut model regresi linier berganda yang digunakan:

$$Q = \alpha + \beta_1 \text{DKI} + \beta_2 \text{DDW} + \beta_3 \text{KOMA} + \beta_4 \text{KEMA} + \beta_5 \text{KEIN} + \beta_6 \text{UP} + \beta_7 \text{LEV} + e$$

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Statistik Deskriptif

Berikut ringkasan hasil analisis deskriptif variabel Nilai Perusahaan (Q), Dewan Komisaris Independen (DKI), Dewan Direksi Perempuan (DDP), Komite Audit (KOMA), Kepemilikan Manajerial (KEMA), Kepemilikan Institusional (KEIN), Ukuran Perusahaan (UP) dan Leverage (LEV) menggunakan program SPSS versi 20:

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	SD
Q	384	0,05	37,23	1,757	3,463
DKI	384	0,14	1,00	0,412	0,121
DDP	384	0,00	1,00	0,252	0,177
KOMA	384	1,00	6,00	3,224	0,724
KEMA	384	0,00	0,74	0,044	0,126
KEIN	384	0,00	0,60	0,048	0,088
UP	384	23,26	34,58	29,266	1,900
LEV	384	0,04	0,95	0,506	0,225
Valid N (listwise)	384				

Sumber: Hasil Olah Data Statistik Deskriptif, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai terkecil (*minimum*), nilai terbesar (*maximum*), rata-rata (*mean*) dan standar deviasi masing-masing variabel dengan jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 384. Diketahui bahwa rata-rata Nilai Perusahaan (Q) sebesar 1,76, nilai minimum sebesar 0,5, nilai maksimum sebesar 37,23 dan standar deviasi sebesar 3,46. Berdasarkan rata-rata Nilai Perusahaan (Q), maka dapat dilihat bahwa rata-rata Nilai Perusahaan di Indonesia sudah baik, yaitu sebesar 1,76 kali dari total aset perusahaannya. Rata-rata Dewan Komisaris Independen (DKI) sebesar 0,41, nilai minimum sebesar 0,14, nilai maksimum sebesar 1,00 dan standar deviasi sebesar 0,12 dengan jumlah observasi (n) sebesar 384. Berdasarkan rata-rata Dewan Komisaris Independen (DKI), maka dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia telah memenuhi ketentuan jumlah Dewan Komisaris Independen sekurang-kurangnya harus 30% dari total anggota Dewan Komisaris, yaitu sebesar 0,41 atau 41%.

Rata-rata Dewan Direksi Perempuan (DDP) sebesar 0,25, nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 1,00 dan standar deviasi sebesar 0,18 dengan jumlah observasi (n) sebesar 384. Berdasarkan rata-rata Dewan Direksi Perempuan (DDP), maka dapat dilihat bahwa di Indonesia keberadaan wanita dalam jajaran Direksi perusahaan sebesar 0,25 atau 25% dari total anggota direksi perusahaan. Rata-rata Komite Audit (KOMA) sebesar 3,22, nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 6,00 dan standar deviasi sebesar 0,72 dengan jumlah observasi (n) sebesar 384. Berdasarkan rata-rata Komite Audit (KOMA), maka dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia telah memenuhi ketentuan keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya adalah 3 orang.

Rata-rata Kepemilikan Manajerial (KEMA) sebesar 0,044, nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 0,74 dan standar deviasi sebesar 0,126 dengan jumlah observasi (n) sebesar 384. Berdasarkan rata-rata Kepemilikan Manajerial (KEMA), maka diketahui bahwa Kepemilikan Manajerial pada perusahaan-perusahaan di Indonesia masih rendah, yaitu sebesar 0,044 atau 4,4%. Rata-rata Kepemilikan Institusional (KEIN) sebesar 0,048, nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 0,60, dan standar deviasi sebesar 0,089 dengan jumlah observasi (n) sebesar 384. Berdasarkan rata-rata Kepemilikan Institusional (KEIN), maka dapat diketahui bahwa kepemilikan saham oleh institusi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia cukup rendah, yaitu sebesar 0,048 atau 4,8%.

Rata-rata Ukuran Perusahaan (UP) sebesar 29,27, nilai minimum sebesar 23,26, nilai maksimum sebesar 34,58 dan standar deviasi sebesar 1,90 dengan jumlah observasi (n) sebesar 384. Berdasarkan rata-rata Ukuran Perusahaan (UP), maka dapat diketahui bahwa Ukuran Perusahaan di

Indonesia sebesar 29,27 dari total asetnya. Rata-rata Leverage (LEV) sebesar 0,506, nilai minimum sebesar 0,04, nilai maksimum sebesar 0,95 dan standar deviasi sebesar 0,225 dengan jumlah observasi (n) sebesar 384. Berdasarkan rata-rata Leverage (LEV) perusahaan, dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan 0,506 atau 50,6% pembelanjaan asetnya melalui hutang.

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Berikut hasil uji t menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 20:

Tabel 3
Hasil Uji t

Variabel	t-statistik	Sig.	α	Kesimpulan
DKI	3,225	0,001	0,05	Signifikan
DDP	4,596	0,000	0,05	Signifikan
KOMA	-0,462	0,645	0,05	Tidak signifikan
KEMA	-1,029	0,304	0,05	Tidak signifikan
KEIN	2,020	0,044	0,05	Signifikan
UP	-0,978	0,329	0,05	Tidak Signifikan
LEV	-1,617	0,107	0,05	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Olah Data, 2021.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi Perempuan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3, dimana nilai signifikansinya $< 0,05$. Sedangkan Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Dapat dibuktikan pada tabel 3, dimana nilai signifikansinya $> 0,05$. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, Ukuran Perusahaan dan Leverage tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Dapat dibuktikan pada tabel 3, dimana nilai signifikansinya $> 0,05$.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen (DKI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (Q). Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen dapat mengurangi *agency cost*. Berdasarkan teori agensi, proporsi Dewan Komisaris Independen yang besar di perusahaan berdampak positif pada nilai perusahaan. Hal ini berkaitan dengan peran Dewan Komisaris Independen sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Keberadaan dewan komisaris independen dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan. Investor mendapatkan jaminan bahwa perusahaan telah diawasi dengan baik yang mampu meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen dalam pelaporan keuangan. Sehingga kualitas laporan keuangan juga semakin baik dan menyebabkan investor tertarik dan percaya untuk menanamkan modal di perusahaan, dengan ini harga saham perusahaan akan lebih tinggi dan nilai perusahaan semakin meningkat (Imani et al., 2016).

Hasil analisis ini sejalan dengan Nuryanah dan Islam (2011), Rano dan Madiastuty (2011), Widyati (2013), bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sama halnya dengan Khan, Awan, 2012 dan Khan et al (2016), bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi hasil yang berbeda diungkapkan Bhagat, Bolton (2008), Chughtai dan Tahir (2015) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini sudah memenuhi ketentuan jumlah komisaris independen minimal 30% dari total komisaris, yaitu 41% dari total komisaris. Hal ini berarti semakin tinggi proporsi Dewan Komisaris Independen, maka akan semakin baik Dewan Komisaris Independen dalam melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan. Dibuktikan dalam hasil penelitian bahwa perusahaan yang memiliki komisaris independen lebih dari 30% dari total komisarisnya memiliki nilai Tobin's Q yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang komisaris independennya kurang dari 30% dari total komisaris perusahaan. Keberadaan dewan komisaris memberikan sinyal yang positif kepada investor, para pemegang saham pada khususnya dan pemangku kepentingan pada umumnya, bahwa seluruh kegiatan perusahaan selalu dipantau dengan baik dan optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris Independen yang tinggi di perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki kontrol yang penuh dan kuat terhadap keputusan manajerialnya, setiap keputusan yang diambil di perusahaan telah dikendalikan sebaik mungkin untuk mempertahankan citra perusahaan dimata publik, investor dan calon investor.

4.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Perempuan Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dewan Direksi Perempuan (DDP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (Q). Adanya Dewan Direksi Perempuan mampu menambah sumber daya perusahaan dan memperluas sudut pandang dalam proses pemecahan berbagai masalah dan perencanaan strategis (Ruigrok et al., 2007). Dimana perusahaan dengan dua orang atau lebih wanita dalam jajaran anggota dewan, memiliki Nilai Perusahaan (Q) yang lebih tinggi dari pada perusahaan lainnya dengan jumlah wanita dalam jajaran anggota dewan kurang dari dua orang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Terjesen et al (2015) bahwa adanya wanita dalam jajaran direksi perusahaan mendorong pengungkapan informasi yang lebih luas, transparan dan beretika, sehingga dapat memberikan reputasi yang baik terhadap perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Carter et al (2003) dan Kumar (2016) bahwa Dewan Direksi Perempuan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi Kusumastuti et al (2007) dan Darmadi (2010) menyatakan hal yang berbeda, bahwa Dewan Direksi Perempuan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Wanita dan pria memiliki ekspektasi yang berbeda dalam bekerja, wanita memandang pekerjaan sebagai pengembangan personal dan kepuasan pribadi, sehingga mereka akan bekerja dengan semangat yang terus-menerus dan cenderung berorientasi pada pencapaian sasaran dan pencapaian usaha perusahaan (Gavious et al., 2012). Dalam jajaran dewan direksi yang heterogen, dimana pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada perusahaan akan menghasilkan ide-ide yang lebih bervariasi, lebih kreatif, lebih banyak pengetahuan dan menghasilkan alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang lebih efektif. Jika laki-laki lebih mengutamakan intuisinya karena pengalaman dan jam terbang yang tinggi, wanita akan mengutamakan kemampuan analisisnya dengan terperinci sehingga permasalahan menjadi lebih mudah untuk dipahami dan diselesaikan. Wanita juga cenderung bekerja secara disiplin sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku, dimana direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan dengan mengutamakan etika, jadi kemungkinan terjadinya kecurangan oleh pihak manajemen perusahaan dapat diminimalisir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya wanita dalam jajaran direksi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan optimal dengan risiko lebih rendah yang dapat meningkatkan Nilai Perusahaan dimata publik, investor dan calon investor.

4.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Komite Audit (KOMA) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (Q). Hal ini menjelaskan bahwa peranan Komite Audit tidak dapat menjamin perlindungan atas hak-hak pemegang saham perusahaan. Semakin banyak jumlah Komite Audit tidak menjamin bahwa perusahaan telah melakukan pengawasan yang baik dan bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rano dan Midiastuty (2011), Nuryanah dan Islam (2011) dan Widayati (2013) yang menyatakan bahwa Komite

Audit tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan Chan, Li (2008) dan Khan et al (2016) bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

Adanya Komite Audit diharapkan membuat operasional perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. Akan tetapi hasil penelitian ini mengemukakan hal yang sebaliknya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sebenarnya sudah memenuhi standar jumlah anggota Komite Audit yang baik, yaitu antara 3-6 orang. Akan tetapi di Indonesia keberadaan Komite Audit tidak terlalu dianggap penting atau hanya pemenuhan formalitas semata (Nuryanah dan Islam, 2011). Meskipun telah terpenuhi secara kuantitas, tapi secara kualitasnya belum terpenuhi. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan pengawasan secara penuh, kemudian membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggungjawabnya terkait dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal dan eksternal, serta sistem pelaporan keuangan. Pada kenyataannya banyak anggota Komite Audit yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengawasan internal dan eksternal, serta tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan yang bagus. Padahal Komite Audit yang ideal harus memenuhi prinsip-prinsip, yaitu independen, memiliki latar belakang pendidikan keuangan yang memadai, memiliki integritas dan objektivitas, paham undang-undang yang terkait dengan perusahaan, taat pada peraturan yang berlaku, serta paham akan etika bisnis yang berlaku. Jika prinsip-prinsip tersebut telah dipenuhi, maka akan tercipta sinergi yang bagus antar anggota dewan perusahaan (termasuk Komite Audit), manajemen keuangan perusahaan (audit internal) dan audit eksternal, sehingga dapat dipastikan bahwa kewenangan dan tanggungjawab Komite Audit sudah terpenuhi atau belum.

Pada perusahaan yang tidak menerapkan penentuan Komite Audit yang baik akan menghambat fungsinya dalam membantu komisaris perusahaan. Dewan Komisaris Independenlah yang akhirnya bekerja lebih keras dalam melakukan fungsi pengawasan pada perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat koordinasi yang baik antara Dewan Komisaris, Komite Audit, Audit Internal dan Audit Eksternal (dalam hal ini adalah pengawasan oleh Pemerintah yang masih lemah), sehingga Komite Audit belum dapat melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dalam membangun Nilai Perusahaan yang lebih baik.

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial (KEMA) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (Q). Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan tidak menjamin berkurangnya perilaku *opportunistic* manajemen dan konflik agenan yang terjadi di perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Wahyudi dan Pawestri (2006), Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan yang tidak dapat diabaikan dalam peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan (termasuk direksi dan komisaris). Manajer memegang beberapa peranan penting karena manajer adalah pelaksana perencanaan, pengorganisasian, pemberi arahan, pengawas dan pihak yang mengambil keputusan. Dengan ini, posisi manajer dan pemegang saham perusahaan menjadi setara, memiliki tujuan yang sama dengan pemegang saham yang akan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik keagenan. Akan tetapi, hal ini konsisten dengan Nuryanah, Islam, Rano, Midiastuty (2011) dan Widyati (2013) bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki Kepemilikan Manajerial yang sangat kecil, yaitu 4,4%. Dengan proporsi kepemilikan saham oleh manajer yang masih sangat kecil mengindikasikan bahwa manajer belum dapat merasakan manfaat program Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan insentif bagi manajer agar termotivasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang kemudian dapat menaikkan nilai perusahaan. Secara teori ketika insentif atau kepemilikan sahamnya rendah, maka kemungkinan terjadinya konflik keagenan dan perilaku *opportunistic* sangat tinggi, sehingga manajer belum dapat berperan penuh dalam menciptakan nilai perusahaan. Bisa juga ketika kepemilikan sahamnya rendah, manajemen kurang termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga tidak terdapat peningkatan kinerja perusahaan yang signifikan yang dapat menaikkan nilai perusahaan dimata publik. Bagi investor dan calon investor, pada perusahaan dengan

Kepemilikan Manajerial yang rendah menjadikan keberadaan Dewan Komisaris Independen sangat perlu dipertimbangkan, karena pada Kepemilikan Manajerial yang rendah memerlukan fungsi pengawasan atau *monitoring* yang tinggi oleh Dewan Komisaris Independen.

4.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional (KEIN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (Q). Artinya, jika Kepemilikan Institusional (KEIN) mengalami peningkatan, maka Nilai Perusahaan (Q) juga akan mengalami peningkatan. Keberadaan investor institusional dianggap sebagai monitoring agent yang efektif dan optimal dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis, sehingga tidak akan mudah percaya terhadap tindakan yang kurang baik (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan institusional berperan penting dalam meminimalkan terjadinya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham.

Hasil ini bertentangan dengan Wahyudi, Pawestri (2006), Chilin dan Grace (2007) bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Akan tetapi, hal ini sejalan dengan Widyati (2013), Hasnawati dan Sawir (2015) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Semakin besar Kepemilikan Institusi, maka semakin besar dorongan institusi untuk mengawasi manajemen dalam mengoptimalkan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan Institusional meliputi lembaga keuangan non bank, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi dan perusahaan reksa dana. Kepemilikan saham oleh institusi dapat meningkatkan fungsi pengawasan atau monitoring atas kegiatan operasional perusahaan yang lebih baik dari pada kepemilikan saham manajemen yang rendah. Kepemilikan institusional merupakan pengawasan yang independen yang lebih efektif dalam memotivasi manajemen perusahaan agar semakin meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham. Kepemilikan ini juga memberikan pengawasan atas pembiayaan perusahaan agar lebih tepat guna dan menghindari pemborosan, serta menjadi suatu pencegahan akan potensi terjadinya praktek manajemen laba yang dapat merusak citra perusahaan. Selain itu, kepemilikan saham oleh institusi juga lebih efektif dalam mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar pemegang saham dan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan, sehingga hal ini juga sekaligus menjadi jaminan kepada para pemegang saham bahwa investasi yang mereka tanamkan diperusahaan terlindungi dan kesejahteraannya menjadi prioritas utama.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh *Corporate Governance* yang terdiri dari Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi Perempuan, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi Perempuan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Hal ini berarti bahwa Komite Audit tidak dapat menjamin perlindungan atas hak-hak pemegang saham perusahaan. Anggota komite audit belum memiliki pengetahuan tentang pengawasan internal dan keuangan yang memadai. Tidak terdapat koordinasi yang baik antara Dewan Komisaris, Komite Audit, Audit Internal dan Audit Eksternal, sehingga Komite Audit belum dapat melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dalam membangun Nilai Perusahaan yang lebih baik. Selain itu, pada perusahaan dengan proporsi kepemilikan saham oleh manajer yang masih sangat rendah mengindikasikan bahwa manajer belum merasakan manfaat adanya program Kepemilikan Manajerial. Manajer belum dapat berperan penuh dalam penciptaan nilai perusahaan. Pada kepemilikan saham manajerial yang rendah, maka Dewan Komisaris akan semakin meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap seluruh kegiatan perusahaan agar nilai perusahaan semakin baik dan kepentingan para pemegang saham dapat terpenuhi.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran oleh peneliti, bagi perusahaan sebaiknya memperhatikan Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi Perempuan dan Kepemilikan Institusional sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan sekaligus menjadi alat bantu dalam menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya. Sedangkan bagi investor, keberadaan Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi Perempuan dan Kepemilikan Institusional dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, karena ketiga variabel tersebut dapat menunjukkan pencapaian kinerja perusahaan yang dapat menentukan nilai perusahaan.

Bagi penelitian yang akan datang, dalam penelitian ini akan lebih baik jika pengukuran dewan komisaris independen menggunakan latar belakang pendidikan dan frekuensi pertemuan. Pengukuran komite audit dapat ditambahkan dengan menggunakan latar belakang pendidikan dan jumlah komite audit independen. Selain itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain yang berkaitan dengan mekanisme *corporate governance*, seperti pengungkapan manajemen risiko perusahaan, keberadaan dewan direksi independen dan kepemilikan institusional asing.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aanu, O. S., Odianonsen, I. F., & Foyeke, O. I. 2014. *Effectiveness of Audit Committee and Firm Financial Performance in Nigeria: An Empirical Analysis*. Journal of Accounting and Auditing, 1-11.
- [2] Abukosim, Mukhtaruddin, Ferina I. S., & Nurcahaya, C. 2014. *Ownership Structure and Firm Values: Empirical Study on Indonesia Manufacturing Listed Companies*. Researchers World: Journal of Arts, Science and Commerce, 5(4), 1-14.
- [3] Bhagat, S., & Bolton, B. 2008. *Corporate Governance and Firm Performance*. Journal of Corporate Finance, 14(3), 257-273.
- [4] Carter, D. A., Simkins, B. J., & Simpson, W. G. 2003. *Corporate Governance, Board Diversity and Firm Value*. Financial Review, 38(1), 33-53.
- [5] Chan, K. C., & Li, J. 2008. *Audit Committee and Firm Value: Evidence on Outside Top Executives as Expert-Independent Directors*. Corporate Governance: An International Review, 16(1), 16-31.
- [6] Chilin & Grace M. Liao. 2007. *Ownership Structure, Information Disclosure and Corporate Value: An Empirical Analysis of Taiwan Companies*. Proceedings of the 13 Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 698-704.
- [7] Chughtai, M. W., & Tahir, W. A. 2015. *Effects of Corporate Governance on Organization Performance: Evidence from Banking Sector of Pakistan*. IOSR Journal of Business and Management, 17(3), 75-82.
- [8] Darmadi, S. 2013. *Do Women In Top Management Affect Firm Performance? Evidence from Indonesia*. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 13(3), 288-304.
- [9] Djaddang, S. 2014. *Penerapan Pengendalian Intern Berbasis Sarbanes Oxley Act Dan Keandalan Pelaporan Keuangan: Studi Internal Audit Pada Perusahaan Publik Di Indonesia*. 3rd Economics & Business Research Festival, 1543-1566.
- [10] Dwiridotjahjono, J. 2016. *Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*. Jurnal Administrasi Bisnis, 5(2), 101-112.

-
- [11] Effendi, M. A. 2008. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Fama, E. F., & Jensen, M. C. 1983. *Agency Problems and Residual Claims*. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 327-349.
- [13] Gavious, I., Segev, E., & Yosef, R. 2012. *Female Directors and Earnings Management in High-Technology Firms*. *Pacific Accounting Review*, 24(1), 4-32.
- [14] Hasnawati, S., & Sawir, A. 2015. *Keputusan Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan dan Nilai Perusahaan Publik di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 17(1), 65-75.
- [15] Imani, Z., Homayoon, A., & Zamani, E. 2016. *The Effect of Corporate Governance on Financial Performance of Listed Firms in Tehran Stock Exchange*. *Academic Journal of Accounting and Economic Researches*, 5(1), 11-21.
- [16] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. *Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- [17] Khan, A., & Awan, S. H. 2012. *Effect of Board Composition on Firm's Performance: A Case of Pakistani Listed Companies*. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3(10), 853-863.
- [18] Khan, A., Tanveer, T., & Malik, U. 2016. *An Epirical Analysis of Corporate Governance and Firm Value: Evidence from KSE-100 Index*. *Accounting*, 3(2), 119-130.
- [19] Klapper, L. F., & Love, I. 2004. *Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets*. *Journal of Corporate Finance*, 10(5), 703-728.
- [20] Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- [21] Kumar, S. 2016. *Corporate Governance And Firm Performance In Indian Listed IT Companies*. *International Journal of Core Engineering & Management*, 2(10), 219-230.
- [22] Kusumastuti, S., Supatmi, S., & Sastra, P. 2007. *Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 88-98.
- [23] McKinsey & Company. 2002. *Global Investor Opinion Survey 2002: Key Findings*. Diambil dari <http://www.mckinsey.com/governance>.
- [24] Muryati, N. N. T. S., & Suardikha, I. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Pada Nilai Perusahaan*. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 425-429.
- [25] Newell, R., & Wilson, G. 2002. *A premium for good governance*. *McKinsey Quarterly*, 3(2), 20-23. Diambil dari <http://www.globalclearinghouse.org>.
- [26] Nuryanah, S., & Islam, S. 2011. *Corporate Governance and Performance: Evidence From An Emerging Market*. *Malaysian Accounting Review*, 10(1), 17-42.
- [27] Rano, R., & Midiastuty, P. P. 2014. *Struktur Kepemilikan, Good Corporate Governance, Investasi Dan Nilai Perusahaan: Suatu Pengujian Sistem Persamaan Simultan*. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 40-66.

- [28] Ruigrok, W., Peck, S., & Tacheva, S. 2007. *Nationality and Gender Diversity on Swiss Corporate Boards*. *Corporate Governance: An International Review*, 15(4), 546-557.
- [29] Siallagan, H., & Machfoedz, M. U. 2006. *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan*. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 23-26.
- [30] Sukamulja, S. 2004. *Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak GCG Terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek Jakarta)*. *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 1-25.
- [31] Sutojo, S., & Aldridge, E. J. 2005. *Good Corporate Governance: Tata Telola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- [32] Terjesen, S., Aguilera, R. V., & Lorenz, R. 2015. *Legislating A Woman's Seat on The Board: Institutional Factors Driving Gender Quotas for Boards of Directors*. *Journal of Business Ethics*, 128(2), 233-251.
- [33] Wahyudi, U., & Pawestri, H. P. 2006. *Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening*. *Simposium Nasional Akuntansi*, 9, 1-25.
- [34] Widyati, M. F. 2013. *Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(1), 234-249.